

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN  
ANGGARAN DAN EVALUASI ANGGARAN  
TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)**

**Oleh:**

**Hevyana Naipospos**

**Pembimbing : Taufeni Taufik dan Julita**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

e-mail: [hevyanan@gmail.com](mailto:hevyanan@gmail.com)

*The Effect of Budget Participation, Budget Goal Clarity and Budget Evaluation  
Against The Performance of Local Government Apparatus  
(Empirical Studies at SKPD Pekanbaru City)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to examine and analyze the effects of budget participation, budget goal clarity and budget evaluation against the performance of local government apparatus in Pekanbaru city. The population in this research is local government apparatus is in SKPD (Service, Office, Agency) which includes 17 Service, 2 Offices and 7 Agencies, totally 26 units SKPD. The sampling technique using purposive sampling method. While the sample in this research is head of SKPD, head of planning and head of public and personnel, overall there are 3 respondents at each Service, Office and Agency. So the respondent in this research as many as 78 respondents. The data of this research using primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple regression analysis approach. The results of this research that budget participation  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,164 > 1,994), budget goal clarity  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (3,552 > 1,994), and budget evaluation  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (3,811 > 1,994), affect the performance of local government apparatus.*

*Keywords: Budget Participation, Budget Goal Clarity, Budget Evaluation, Performance Apparatus*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.” Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pemerintah daerah harus memiliki kinerja yang baik, yaitu dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Anggaran merupakan alat yang digunakan dalam melakukan perencanaan, pengendalian

dan pengawasan keuangan daerah. Mulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, pertanggung jawaban yang berupa laporan hasil pelaksanaan APBD, dan pengawasan terhadap APBD.

Kinerja aparat pemerintah daerah sendiri selama ini masih dikatakan lemah. Lemahnya kinerja aparat pemerintah daerah dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan dan pelanggaran terhadap anggaran. Misalnya terdapat kasus pelanggaran seperti korupsi. Salah satu contoh telah terjadinya kasus korupsi yaitu berdasarkan hasil analisis data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2013 ada temuan terkait dana bantuan sosial (bansos) yang nilainya sebesar Rp. 3,9 miliar diduga disalurkan untuk organisasi fiktif. Sementara di tahun 2011 lalu juga ada penemuan Rp. 961 juta dana bansos yang nihil dipertanggung jawabkan pemerintah Kota Pekanbaru (GoRiau.com). Dari kasus ini berarti masih rendahnya pengawasan terhadap anggaran daerah yang merupakan keuangan negara, dan sekaligus menunjukkan masih rendahnya kinerja aparat pemerintah daerah.

Proses penganggaran perlu adanya partisipasi aparat dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan evaluasi terhadap anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran menunjukkan keikutsertaan aparat untuk merencanakan anggaran dan memahami anggaran. Jalaluddin (2009) menyatakan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Partisipasi

menjadikan terjalinnya komunikasi yang baik, interaksi aparat satu dengan yang lainnya, serta membangun kerjasama dalam tim sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Kenis (1979) menyatakan kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik. Emilia (2013) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Artinya semakin jelas dan spesifik suatu sasaran anggaran ditetapkan, maka akan membuat aparat pemerintah memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga akan ikut meningkatkan kinerja aparat pemerintah itu sendiri.

Munawar (2006) dalam penelitiannya menjelaskan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. Tindakan evaluasi anggaran untuk menelusuri penyimpangan terhadap anggaran sebagai dasar penilaian kinerja, hal ini yang akan berpengaruh terhadap sikap dan kinerja aparat menjadi lebih baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jalaluddin (2009). Perbedaannya adalah penelitian Jalaluddin dilakukan pada SKPD Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan pada SKPD Kota Pekanbaru.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Kinerja Aparat Pemda**

Kinerja yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2013:25). Selanjutnya Mahsun menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) elemen pokok suatu pengukuran kinerja, antara lain berikut.

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi,

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Menurut Bastian (2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimana pengukuran atau indikator tersebut meliputi aspek-aspek antara lain indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

#### **Partisipasi Anggaran**

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggung jawab bersama (Soetrisno, 2010). Partisipasi menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang telah diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka (Munawar, 2006).

Menurut penelitian Nurhalimah (2013) partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan aparat pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap aparat pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Sasaran menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah “hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.” Kenis (1979) menyatakan kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam realisasinya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Suwandi, 2013).

Menurut penelitian Emilia (2013) dalam optimalisasi penganggaran dibutuhkan kejelasan sasaran kegunaannya. Anggaran yang tidak diketahui sasarannya akan mengakibatkan tidak sesuainya kegunaan dari anggaran yang semula direncanakan.

### **Evaluasi Anggaran**

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja (Fitriani, 2013). Tindakan evaluasi anggaran untuk menelusuri penyimpangan terhadap anggaran sebagai dasar penilaian kinerja, hal ini yang akan berpengaruh terhadap sikap dan kinerja aparat menjadi lebih baik. Dengan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah daerah maka akan diketahui seberapa besar tingkat

partisipasi dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Menurut penelitian Jalaluddin (2009) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran akan relatif meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Mendukung hasil tersebut penelitian Munawar (2006) juga menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang telah diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka (Munawar, 2006). Partisipasi akan memberikan kesempatan yang cukup untuk berinteraksi, sehingga semua anggota dalam organisasi dapat bekerjasama dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Jumaiyah, 2013).

Menurut penelitian Nurhalimah (2013) partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan aparat pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap aparat pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Mendukung penelitian tersebut Wulandari (2011)

juga menemukan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

H<sub>1</sub> : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Kenis (1979) menyatakan kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam realisasinya.

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Suwandi, 2013).

Menurut penelitian Emilia (2013) kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah. Dalam optimalisasi penganggaran dibutuhkan kejelasan sasaran kegunaannya. Anggaran yang tidak diketahui sasarannya akan mengakibatkan tidak sesuai kegunaan dari anggaran yang semula direncanakan.

H<sub>2</sub> : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### **Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja. Evaluasi anggaran untuk menelusuri penyimpangan terhadap anggaran sebagai dasar penilaian kinerja, hal ini yang akan berpengaruh terhadap sikap dan kinerja aparat menjadi lebih baik (Fitriani, 2013).

Menurut penelitian Jalaluddin (2009) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran akan relatif meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Mendukung hasil tersebut penelitian Munawar (2006) juga menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

H<sub>3</sub> : Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah pada SKPD yaitu dinas, kantor dan badan di Kota Pekanbaru, yaitu terdapat 17 dinas, 2 kantor, dan 7 badan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Sampel penelitian ini adalah kepala SKPD, kepala sub bagian perencanaan, dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, pada setiap dinas, kantor dan badan, sehingga total sampel berjumlah 78 orang.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2011:60).

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab (Sekaran, 2011:82).

Kuesioner disampaikan dengan cara mendatangi responden secara langsung, lalu responden memilih salah satu alternatif jawaban dari opininya.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional adalah mengoperasionalkan, atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur (Sekaran, 2011).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert 5 poin dengan pilihan Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

### **Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)**

Kinerja aparat pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program aparat pemerintah daerah yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggarannya dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur (PP RI Nomor 58 Tahun 2005).

Pengukuran kinerja aparat pemerintah daerah menggunakan instrumen Mahsun (2013) berikut indikatornya.

1. Merumuskan visi dan misi.
2. Merumuskan falsafah.
3. Menentukan kebijakan, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
4. Menyusun program dan anggaran.
5. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
6. Menetapkan sistem pengukuran kinerja.
7. Implementasi sistem pengukuran kinerja.
8. Pelaporan hasil pengukuran kinerja.
9. Monitoring, evaluasi dan *feed back*.

### **Partisipasi Anggaran (X<sub>1</sub>)**

Partisipasi anggaran merupakan luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang telah diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka (Munawar, 2006).

Pengukuran partisipasi anggaran dalam penelitian ini menggunakan instrumen Jumaiyah (2013) berikut indikatornya.

1. Anggaran disusun berdasarkan partisipasi.
2. Kontribusi.
3. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran.
4. Pendapat dan usulan dalam anggaran.
5. Pengaruh partisipasi.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran (X<sub>2</sub>)**

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979).

Pengukuran variabel kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian ini menggunakan instrumen Fitriani (2013) berikut indikatornya.

1. Spesifik sasaran anggaran.
2. Sasaran tidak jelas.
3. Pemahaman anggaran.

### **Evaluasi Anggaran (X<sub>3</sub>)**

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka (Munawar, 2006).

Pengukuran evaluasi anggaran dalam penelitian ini menggunakan instrumen Jumaiyah (2013) berikut indikatornya.

1. Penggunaan anggaran dengan dedikasi dan profesionalisme.
2. Persiapan dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan.
3. Dapat diandalkan.
4. Melakukan evaluasi anggaran.

### **Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS dengan beberapa tahap. Analisis data memiliki tiga tujuan antara lain mendapatkan perasaan terhadap data, menguji kualitas data, dan menguji hipotesis penelitian (Sekaran, 2011:175).

### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif meliputi transformasi data mentah ke dalam bentuk yang akan memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam suatu situasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurutkan dan memanipulasi data mentah yang diperoleh (Sekaran, 2011:285).

### **Uji Kualitas Data**

#### **Uji Validitas**

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2011:39). Pengujian validitas menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Nilai  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka instrumen yang digunakan dinyatakan valid.

#### **Uji Reliabilitas**

*Reliability* atau keandalan menguji seberapa konsisten suatu instrumen pengukuran mengukur apa pun konsep yang diukurnya (Sekaran, 2011:39). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Semakin dekat *Cronbach's Alpha* dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2011:177).

#### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai kontribusi atau tidak (Ghozali, 2013:160). Dengan menggunakan *Normal P-P Plot Regression Standardized Residual*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, begitu pula sebaliknya.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:106).

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Gejala dideteksi menggunakan grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada period ke *t-1* (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat autokorelasi (Ghozali, 2013:110). Autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test), jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

### **Analisis Regresi Berganda**

Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja aparat

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$  = Koefisien arah regresi

$X_1$  = Partisipasi Anggaran

$X_2$  = Kejelasan Sasaran Anggaran

$X_3$  = Evaluasi Anggaran

e = Error/faktor pengganggu

#### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai  $R^2$  mendekati 1, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

#### **Uji Hipotesis**

Uji hipotesis untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel bebas memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji *t*. Keputusan diambil dengan cara membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta membandingkan nilai signifikan *t* dengan *level of significant* pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau 5%.

Variabel independen yang akan diuji yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan evaluasi anggaran, terhadap variabel

dependen yaitu kinerja aparat pemerintah daerah. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

$H_0$ : tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a$ : terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Statistik Deskriptif**

#### **Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Kinerja aparat pemerintah daerah dinilai menggunakan 17 pernyataan. Total skor jawaban responden sebesar 5.080, nilai minimal 1.275, nilai maksimal 6.375, rata-rata skor 3,98 dan standar deviasi sebesar 6,275.

#### **Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran dinilai menggunakan 5 pernyataan. Total skor jawaban responden diperoleh sebesar 1.424, dengan nilai minimal 375, nilai maksimal 1.875, rata-rata skor 3,79 dan standar deviasi sebesar 2,826.

#### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran dinilai menggunakan 3 pernyataan. Total skor jawaban responden sebesar 855, dengan nilai minimal 225, nilai maksimal 1.125, rata-rata skor 3,8 dan standar deviasi sebesar 1,785.

#### **Evaluasi Anggaran**

Evaluasi anggaran dinilai menggunakan 4 pernyataan. Total skor jawaban responden sebesar 1.004, dengan nilai minimal 300, nilai maksimal 1.500, rata-rata skor 3,34 dan standar deviasi sebesar 2,720.

## **Hasil Uji Kualitas Data**

### **Hasil Uji Validitas**

Keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 29 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , maka item-item pernyataan dinyatakan valid. Nilai  $r_{tabel}$  diperoleh dengan persamaan  $N-2 = 75-2 = 73 = 0,227$ .

Nilai  $r_{hitung}$  untuk pernyataan semua variabel adalah berkisar antara (0,410) sampai (0,882). Semua nilai  $r_{hitung}$  untuk masing-masing pernyataan lebih besar dari 0,227. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing pernyataan dalam penelitian ini adalah valid.

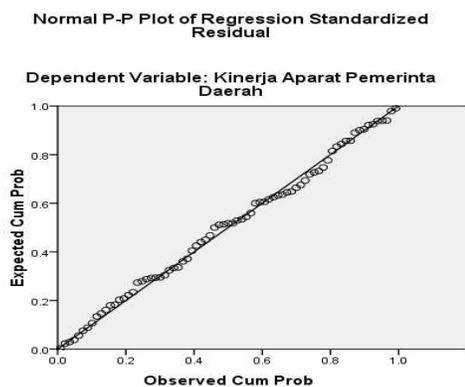
### **Hasil Uji Reliabilitas**

Nilai reliabilitas dalam uji ini adalah pada kolom *Reliability Statistics (Cronbach's Alpha)*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 maka nilainya baik, artinya alat ukur yang digunakan reliabel.

Koefisien reliabilitas instrumen kinerja aparat pemerintah daerah, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan evaluasi anggaran antara lain 0,815, 0,849, 0,763, 0,833. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

### **Hasil Uji Normalitas**

Dengan menggunakan *Normal P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil uji normalitas pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Dari gambar diatas terlihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

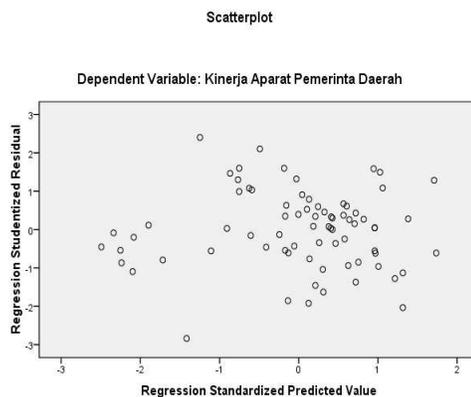
**Hasil Uji Asumsi Klasik**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Apabila nilai  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0,10$  berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:106).

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai  $VIF$  untuk seluruh variabel bebas (3,146, 3,001, 1,838)  $< 10$  dan  $tolerance$  (0,318, 0,333, 0,544)  $> 0,10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW Test), bila nilai DW antara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat adanya autokorelasi.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai  $d_{hitung}$  (*Durbin Watson*) terletak antara -2 dan 2 =  $-2 < 1,282 < 2$ . Maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut.

$$Y = 34,168 + 0,534 X_1 + 1,356 X_2 + 0,748 X_3 + e$$

**Keterangan:**

a = Nilai konstanta (a) sebesar 34,168. Artinya adalah apabila

variabel independen di asumsikan nol (0), maka kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 34,168.

- $b_1$  = Nilai koefisien regresi variabel partisipasi anggaran sebesar 0,534. Artinya setiap peningkatan partisipasi anggaran sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,534 dengan asumsi variabel lain tetap.
- $b_2$  = Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 1,356. Artinya setiap peningkatan kejelasan sasaran anggaran sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 1,356 dengan asumsi variabel lain tetap.
- $b_3$  = Nilai koefisien regresi variabel evaluasi anggaran sebesar 0,748. Artinya setiap peningkatan evaluasi anggaran sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,748 dengan asumsi variabel lain tetap.
- $e$  = Standar error ( $e$ ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (  $R^2$  )**

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai  $R$  Square sebesar 0,721. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap kinerja aparat pemerintah

daerah adalah sebesar 72,1%. Sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini, seperti peran manajerial, desentralisasi, umpan balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran, dan sistem pengendalian intern.

**Pembahasan**

Untuk mengetahui hasil uji terhadap hipotesis, maka dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig. < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap dependen.

Nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan berikut.

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\
 &= 75 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\
 &= 71 : 0,025 \\
 &= 1,994
 \end{aligned}$$

keterangan:

- n : jumlah
- k : jumlah variabel bebas
- 1 : konstan

**Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Hipotesis 1**

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Partisipasi Anggaran ( $X_1$ )	2.164	.034	Berpengaruh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,164) > (1,994) dan Sig. (0,034) < 0,05. Dengan

demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Wulandari (2011) juga menemukan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Jalaluddin (2009), Emilia (2013), dan Munawar (2006).

Namun hasil penelitian ini menentang penelitian terdahulu Maryanti (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian Ramandei (2010) juga menyatakan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Hipotesis 2**

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_2$ )	3.552	.001	Berpengaruh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,552 > (1,994)$ ) dan  $Sig. (0,001) < 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh

signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fitriani (2013), Jalaluddin (2009) dan Suwandi (2013), namun hasil penelitian ini menentang hasil penelitian terdahulu oleh Nurhalimah (2013) dan Jumaiyah (2013) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### **Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hipotesis 3**

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Evaluasi Anggaran ( $X_3$ )	3.811	.000	Berpengaruh

Dari di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,811 > (1,994)$ ) dan  $Sig. (0,000) < 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Artinya variabel evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Jalaluddin (2009), Munawar (2006) dan Fitriani (2013) yang menunjukkan bahwa evaluasi anggaran akan relatif meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.

Namun hasil penelitian ini menentang penelitian dari Maryanti (2010) dan Ramandei (2010) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Hasil uji hipotesis pertama membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,164 > (1,994)$ ) dan Sig. ( $0,034 < 0,05$ ). Dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
2. Hasil uji hipotesis kedua membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,552 > (1,994)$ ) dan Sig. ( $0,001 < 0,05$ ). Dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.
3. Hasil uji hipotesis ketiga membuktikan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,811 > (1,994)$ ) dan Sig. ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.
4. Hasil pengujian diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,721. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap kinerja aparat pemerintah daerah adalah sebesar 72,1%. Sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini, seperti peran manajerial, desentralisasi, umpan

balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran, dan sistem pengendalian intern.

### Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya aparat pemerintah daerah yang ada di Kota Pekanbaru saja namun diperluas hingga aparat pemerintah daerah Provinsi Riau atau daerah lainnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan evaluasi anggaran. Oleh karena itu diharapkan pada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabe kinerja aparat pemerintah daerah.
3. Bagi instansi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran yang hendak dicapai, dan melakukan evaluasi terhadap anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, dengan demikian akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota pekanbaru.
4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang

mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Emilia, Rahmi Nur, Willy Abdillah, dan Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi dalam Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Bengkulu). *Jurnal Fairness*. Volume 3, No. 3 ISSN 2303-0348.
- Fitriani, Devi. 2013. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jalaluddin dan Dafi Bahri. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Volume 2, No. 1, hal. 44-53.
- Jumaiyah. 2013. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Kenis, Izzetin. 1979. *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes And Performance*. *The Accounting Review*. Volume LIV No. 4. Oktober, pp. 707-721.
- Mahsun, Muhamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Maryanti. 2010. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Munawar. Gugus Irianto, dan Nurkholis. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Nurhalimah, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh. *Jurnal Akuntansi*. ISSN 2302-0164 pp. 27-36.
- Ramandei, Pilipus. 2010. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi*. Volume 10:55-73.
- Riduwan. 2005. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 4 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Soetrisno. 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suwandi, Annisa Pratiwy. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Wulandari, Nur Endah. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. 2009. Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2009. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- <http://www.pekanbaru.bpk.go.id/?p=17867>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2014).
- <http://www.GoRiau.com/berita/hukrim/waduh-kpk-kecolongan-lagi-rp-39-m-dana-bansos-di-pekanbaru-disalurkan-untuk-organisasi-fiktif.html>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2014).